

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI GUNADI SADIKIN**
2. Jabatan : **WAKIL MENTERI**
3. NHK : **92423**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 89.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 582 m²/292 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 331 m²/150 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000.000
3. Bangunan Seluas 50 m² di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1193 m²/568 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/160 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/160 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 1.025.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ E 300 SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, MINI COOPER SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOBIL, MAZDA 2 ALL NEW SKYACTIV R AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 4.315.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. 63.245.639.505**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.206.419.954
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	161.792.059.459
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	161.792.059.459

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.